



RENJA

2024

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Administrasi Pembangunan	41
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	52
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi	52
4.2 Prioritas Perangkat Daerah	52
BAB V PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana strategis sampai dengan Tahun 2020 (Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 – Berdasarkan Renstra 2019 - 2024)	7
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana strategis sampai dengan Tahun 2020 (<i>Berdasarkan Renstra 2019 – 2024</i>)	11
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana strategis Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 (Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan – Berdasarkan Perubahan Renstra 2019 - 2024)	14
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	25
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur	32
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan	44
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025	45
Tabel 4.1	Prioritas Perangkat Daerah	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang –Undnag Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja

10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024
 23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
 24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan

b. Tujuan

Penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan dan penyusunan rencana anggaran serta evaluasi program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat : (1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra; (2) Analisis Kinerja Pelayanan; (3) Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi; (4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD; (5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat : (1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; (2) Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan, mengacu pada kesesuaian dengan dokumen RKPD dan dokumen Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur; (3) Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat : Prioritas perangkat daerah yang mendukung Prioritas Provinsi dan Prioritas Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

Memuat : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah melalui penelusuran terhadap program / kegiatan yang tidak memenuhi target, yang memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sehingga dapat diketahui faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja dari program/kegiatan yang direncanakan. Selain itu dapat diketahui dampak yang timbul terhadap capaian kinerja yang pada akhirnya dapat diambil tindakan / kebijakan untuk mengatasi faktor penyebabnya.

Evaluasi Renja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2024 didasarkan pada Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 - 2024 dan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 terbagi dalam 3 periode sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA dan
Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2019
(Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 – Berdasarkan Renstra 2014 – 2019)

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
								K	K	K	K	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)
1		2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)
1	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1	3	03	1		Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100	100	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	1	19	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (kegiatan lama)	100	100	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program lama)	100	100	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	2	12	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (kegiatan lama)	52	30	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	2	31	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (kegiatan lama)	36	20	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
								K	K	K	K	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)
1		2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)
		1	3	03	7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (program lama)	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	100	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	7	1	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah (kegiatan lama)	Jumlah konsultasi	4.100	2.000	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1	3	03	7	2	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah (kegiatan lama)	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan/ pendidikan/pelatihan	173	65	-	-	-	-	-
		1	3	03	8	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah (Program Lama)	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	100	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	8	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan (kegiatan lama)	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	32	12	-	-	-	-	-
		1	3	03	8	2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran (kegiatan lama)	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	32	12	-	-	-	-	-
		1	3	03	8	3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data (kegiatan lama)	Jumlah update database Perangkat Daerah	8	4	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		
							K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
							K	K	K	K	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
1		2				3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
		1	3	03	30	Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (Program Lama)	Persentase pengendalian administrasi pembangunan sesuai ketentuan	100	100	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	31	Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan (Program Lama)	Persentase kebijakan pembangunan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	100	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1	3	03	31	1	Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik (kegiatan lama)	Jumlah notulen rapat	20	12	-	-	-	-	-
								Jumlah paket lelang yang dilelang melalui LPSE	6.700	4.100	-	-	-	-	-
		1	3	03	31	2	Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan dan jasa konstruksi (kegiatan lama)	Jumlah laporan pengendalian terhadap pengadaan barang /jasa	6	2	-	-	-	-	-
		1	3	03	31	3	Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis (kegiatan lama)	Jumlah laporan pelaporan program strategis	10	4	-	-	-	-	-
		1	3	03	31	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik (kegiatan lama)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli	297	192	-	-	-	-	-
		1	3	03	31	5	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (kegiatan lama)	Jumlah paket yang selesai diproses	900	9000	-	-	-	-	-
		1	3	03	31	6	Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa (kegiatan lama)	Jumlah peserta Bimtek dan ujian pengadaan barang/jasa	35	35	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
								K	K	K	K					
1	2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)		
		1	3	03	31	7	Advokasi Pengadaan Barang/Jasa / Jasa (kegiatan lama)	Jumlah advokasi PBJ	8	8	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1	3	03	84		Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan (Program Lama)	Persentase tingkat pelayanan administrasi pembangunan	100	100	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	84	1	Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Prov. Jatim (Kegiatan Lama)	Jumlah peserta ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa	400	160	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	84	7	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim (Kegiatan Lama)	Jumlah pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemprov. Jatim	5	4	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	84	11	Penyusunan Standar Satuan Harga (kegiatan lama)	Jumlah rumusan kebijakan SSHBJ dan ASB	13	7	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA dan
Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2020
(Berdasarkan Renstra 2019 – 2024)

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
										K	K				
1	2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
Meningkatnya Kebijakan dibidang Pembangunan	1	3	03	01	Program Pelayanan Kesekretariatan	1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan	82,5	-	82,2	80,79	98,16	-	-	-	
						2. Persentase Indikator Program yang tercapai	100	-	100	100	100	-	-	-	
						3. Persentase realisasi anggaran	97	-	95	95	97,93	-	-	-	
						4. Indeks Profesionalitas ASN	88	-	88	83	94,31	-	-	-	
	3	3	03	01	008	Penyusunan Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian	30	-	30	30	100	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)					
				K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)				
				4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)				
1	2		3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)				
	1	3	03	19	Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Jumlah rumusan kebijakan	15	-	3	3	100	-	-	-	
	1	3	03	19	001	Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya	Jumlah modul kebijakan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya	18	-	3	3	2020	-	-	-
	1	3	03	19	002	Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur sumber daya air	Jumlah modul kebijakan sumber daya air	13	-	2	2	100	-	-	-
	1	3	03	19	003	Penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi	Jumlah modul kebijakan jasa konstruksi	14	-	2	2	100	-	-	-
	1	3	03	20	Program sinkronisasi Infrastruktur Proyek Strategis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kebinamrgaan dan Perhubungan	Jumlah rumusan kebijakan	-	-	2	2	100	-	-	-	
	1	3	03	20	001	Penyelenggaraan administrasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan sinergitas proyek strategis	Jumlah modul kebijakan pembangunan proyek strategis dan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha	25	-	3	3	100	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
										K	K					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)						
		1	3	03	20	002	Penyelenggaraan administrasi pembangunna infrastruktur kebinamargaan	Jumlah modul kebijakan infrastruktur kebinamrgaan	20	-	2	2	100	-	-	-
		1	3	03	31	003	Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur perhubungan	Jumlah modul kebijakan infrastruktur perhubungan	20	-	2	2	100	-	-	-
		1	3	03	21		Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan	8	-	8	8	100	-	-	-
		1	3	03	21	001	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Satuan Harga	Jumlah modul pedoman pelaksanaan pembangunan dan standar satuan harga	20	-	4	4	100	-	-	-
		1	3	03	21	002	Evaluasi dan Pengendalian Realisasi	Jumlah modul realisasi anggaran APBD dan APBN	23	-	4	4	100	-	-	-

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2022
(Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan – Berdasarkan Perubahan Renstra 2019 - 2024)

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD Tahun 2019 – 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		Tingkat capaian (%)
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	
										K	K				
1	2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
Meningkatnya Kebijakan dibidang Pembangunan	x	x	x	0	1	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN (Program 2021)	1. Persentase Indikator Program yang tercapai (indikator 2021)	100	100	100	100	100	100	100	100
							2. Persentase realisasi anggaran (indikator 2021)	97	95	96	96,24	100	97	97,31	100
							3. Indeks Profesionalitas ASN (indikator 2021)	67	88	65	67,5	100	66	85,15	100
							4. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro AP (indikator 2021)	81,4	80,78	81,2	80,79	99,49	81,3	81,43	100
	4	0	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (Program 2021 s.d. 2022)	1. Persentase Indikator Program yang tercapai (Indikator 2022 – 2024)	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		Tingkat capaian (%)
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	
										K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)					
						2. Persentase realisasi anggaran (indikator 2022 – 2024)	97	95	96	96,24	100	97	97,31	100	
						3. Indeks Profesionalitas ASN (Indikator 2021 – 2024)	67	83	66	67,5	100	67	85,15	100	
	4	01	01	101		jumlah dokumen perencanaan anggaran perangkat Daerah (Indikator 2021 – 2024)	36	12	12	12	100	13	13	100	
						Jumlah dokumen pelaporan (Indikator 2021 – 2024)	16	4	4	4	100	4	4	75	
	4	01	01	101	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (indikator 2021 – 2024)	6	2	2	2	100	11	11	100
	4	01	01	101	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah dokumen RKA (Indikator 2021 – 2022)	4	1	1	1	100	1	1	100
	4	03	01	101	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	Jumlah dokumen RKA Perubahan (Indikator 2021 – 2022)	4	1	1	1	100	1	1	100

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		Tingkat capaian (%)		
							K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian			
							K	K	K	K	8=7/6	9	10 (5+7+9)		11= (10/4)	
1		2				3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)		
		4	01	01	101	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	Jumlah dokumen DPA (Indikator 2021 – 2022)	4	1	1	1	100	1	1	100
		4	01	01	101	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah dokumen DPA Perubahan (Indikator 2021-2022)	4	1	1	1	100	1	1	100
		4	01	01	101	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah dokumen capaian kinerja (Indikator 2021-2022)	18	6	6	6	100	6	6	100
		4	01	01	101	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah rumusan dokumen evaluasi renja (Indikator 2021-2022)	16	4	4	4	100	4	4	100
		4	01	01	102		Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah dokumen administrasi keuangan (Indikator 2021 – 2024)	48	12	12	12	100	12	12	100
		4	01	01	102	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Indikator 2021-2022)	48	12	12	12	100	12	12	100
		4	01	01	102	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan verifikasi penatausahaan (Indikator 2021-2022)	48	12	12	12	100	12	12	100

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		Tingkat capaian (%)
		K	K	Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi					
				K	K		8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)				
	4 01 01 102 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD(Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan akuntansi perangkat daerah (Indikator 2021-2022)	48	12	12	12	100	12	12	100			
	4 01 01 102 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan keuangan SKPD (Indikator 2021-2022)	8	2	2	2	100	2	2	100			
	4 01 01 102 06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan tanggapan atas LHP (Indikator 2021-2022)	4	1	1	1	100	1	1	100			
	4 01 01 102 08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan prognosis (Indikator 2021-2022)	4	1	1	1	100	1	1	100			
	4 01 01 103	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan BMD (Indikator 2021 – 2024)	48	12	12	12	100	12	12	100			
	4 01 01 103 01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD (Indikator 2021-2022)	16	4	4	4	100	4	4	100			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		Tingkat capaian (%)
		K	K	Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian					
				K	K									
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)				
	4 01 01 105	Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian PD (Indikator 2021 – 2024)	48	12	12	12	100	12	12	100			
	4 01 01 105 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan data pegawai (Indikator 2021-2022)	48	12	12	12	100	12	12	100			
	4 01 01 105 05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan SKP (Indikator 2021-2022)	48	12	12	12	100	12	12	100			
	4 01 01 105 94	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (Indikator 2021-2022)	4	1	1	1	100	61	61	100			
	4 01 01 106	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa (Indikator 2021 – 2024)	20	5	5	5	100	5	5	100			
	4 01 01 106 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah paket pengadaan (Indikator 2021-2022)	4	1	1	1	100	1	1	100			
	4 01 01 106 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah paket pengadaan (Indikator 2021-2022)	4	1	1	1	100	1	1	100			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		Tingkat capaian (%)
							K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	
									K	K	8=7/6		9	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)				
	4 01 01 106 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah paket pengadaan (Indikator 2021-2022)	4	1	1	1	100	1	1	100			
	4 01 01 106 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan (Indikator 2021-2022)	4	1	1	1	100	1	1	100			
	4 01 01 106 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	1. Jumlah daftar arsip aktif 2. Jumlah daftar arsip inaktif 3. Jumlah daftar arsip vital (Indikator 2021-2022)	1. 4 2. 4 3. 4	1. 1 2. 1 3. 1	1. 1 2. 1 3. 1	1. 1 2. 1 3. 1	1. 100 2. 100 3. 100	1. 1 2. 1 3. 1	1. 1 2. 1 3. 1	100			
	4 01 01 107	Keg Pengadaan Barang Milik Daerah (Kegiatan 2021 – 2024)	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana (Indikator 2021 – 2024)	4	1	1	1	100	1	1	100			
	4 01 01 107 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan (Indikator 2021-2022)	4	1	1	1	100	1	1	100			
	4 01 01 108	Keg Peny. Jasa Penunjang Urusan PD (Kegiatan 2021 – 2024)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indikator 2021 – 2024)	4	1	1	1	100	1	1	100			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		Tingkat capaian (%)	
		K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Realisasi capaian							
				K	K	8=7/6		9	10 (5+7+9)	11= (10/4)						
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)						
		4	01	01	108	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah pengiriman dokumen (Indikator 2021-2022)	4	1	1	1	100	1	1	100
		4	01	01	109		Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara (Indikator 2021 – 2024)	48	12	12	12	100	12	12	100
		4	01	01	109	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah jasa (Indikator 2021-2022)	48	12	12	12	100	12	12	100
		4	01	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Indikator 2021-2024)	48	12	12	12	100	12	12	100
		4	01	01	109	09	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (Indikator 2023-2024)	24	6	6	6	100	6	6	100
		4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Program 2021 – 2024)	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan (Indikator 2021 – 2024)	60	28	16	27	100	16	32	100

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		Tingkat capaian (%)
		K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Realisasi capaian						
				K	K										
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)					
	4 01 08 101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Kegiatan 2021 – 2024)	45	18	11	18	100	11	18	100					
	4 01 08 101 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	12	5	4	5	100	4	4	100					
	4 01 08 101 02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	16	4	4	4	100	4	4	100					
	4 01 08 101 03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	13	9	3	9	100	3	4	100					
	4 01 08 102	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Kegiatan 2021 – 2024)	14	9	5	9	100	5	20	100					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1)		Tingkat capaian (%)
		K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Realisasi capaian						
				K	K	8=7/6				9	10 (5+7+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)					
	4 01 08 102 01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah (Indikator 2021-2022)	13	3	3	4	100	3	4	100				
	4 01 08 102 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah (Indikator 2021-2022)	12	3	2	2	100	2	2	100				
	4 01 08 102 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Sub Kegiatan 2021 – 2024)	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah (Indikator 2021-2022)	13	6	3	4	100	3	16	100				

Berdasarkan tabel rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2020, yaitu :

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2020
Merupakan realisasi atas target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2020 yang berdasarkan pada Renstra 2014 - 2019
Analisis kinerja pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur akan diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kinerja yang ada dan pada tahun 2019 kinerja Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan 7 Program dengan 21 Kegiatan sebesar **96,02 %** yaitu **Rp. 29.933.370.593,-** dari Pagu Anggaran **Rp. 31.441.017.000**
2. Tabel 2.2 Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2020
Merupakan realisasi atas target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2020 yang berdasarkan pada Renstra 2019 – 2024
Pada Tahun 2020 terdapat 4 program dengan 9 kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020 dengan total pagu sebesar **Rp. 27.846.180.718,-** didapatkan realisasi anggaran sebesar **Rp. 26.458.96.431,-** atau terealisasi **95,02 %** yang artinya ada efisiensi dan efektivitas atau sebab lainnya sebesar **4,98 %**.
2. Tabel 2.3 Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2022
Merupakan realisasi atas target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2022 yang berdasarkan pada Renstra Perubahan 2019 – 2024
Target program dan kegiatan Renja Tahun 2023 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan, tidak terisi hal ini dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur program/kegiatan. Untuk Tahun 2020 mengacu Renstra Tahun 2019-2024 sedangkan nomenklatur

program kegiatan Tahun 2023 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk Tahun 2021 merupakan tahun transisi perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Pada Tahun 2023 terdapat 2 program dengan 10 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022 dengan total pagu sebesar Rp. 19.284.878.000 didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.765.867.328 atau terealisasi 97,31 % yang artinya ada efisiensi dan efektivitas atau sebab lainnya sebesar 2,61 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur akan diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kinerja yang ada dan pada tahun 2022 kinerja Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi dari 2 program dengan 10 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022 dengan total pagu sebesar Rp. 19.284.878.000 didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.765.867.328,- atau terealisasi 97,31 % yang artinya ada efisiensi dan efektivitas atau sebab lainnya 2,61 % Adapun hasil/keluaran kinerja akan diuraikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan

(T-C.30 Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Sesuai dengan Perubahan Renstra 2019 – 2024)

No	Indikator	Tujuan	Sasaran	SPM/ Std. Nas.	IKK	MCP	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	V	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pembangunan	-	V	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	-	V	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Adm. Pembangunan	-	V	-	-	-	-	-	82,3	81,2	81,3	81,4	80,79	81,43	81,3	81,4	Menjadi Sasaran sesuai Perubahan Renstra 2019 - 2024
5	Penetapan ASB	-	-	-	-	V	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
6	Implementasi ASB	-	-	-	-	V	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

Dapat dijelaskan tabel 2.4, pada dasarnya indikator tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan dapat dicapai secara baik. Target Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa Penetapan dan Implementasi ASB juga telah dicapai dengan baik pada tahun 2022.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Pembangunan bertugas Penyiapan Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Pelaksanaan Tugas Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang antara lain :

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah kurang optimal.
2. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunna wilayah dan Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) kurang optimal
3. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan kurang optimal.
4. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur kurang optimal
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) kurang optimal.
6. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan kurang optimal.
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian

tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah kurang optimal

8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur kurang optimal
9. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan kurang optimal

Dalam melaksanakan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan menghadapi Permasalahan dan mencoba mengatasinya. Berikut Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah secara spesifik sesuai dengan Sub Kejadiannya :

1. Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD

Permasalahan yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah :

- a. Data realisasi keuangan, fisik dan permasalahan pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur terupdate setiap bulan belum realtime.
- b. Masih adanya realisasi keuangan dan fisik Perangkat Daerah tidak sesuai dengan target yang direncanakan.
- c. Data realisasi keuangan, fisik dan permasalahan pelaksanaan APBD di Kabupaten – Kota Se-Jawa Timur belum terupdate tepat waktu setiap bulan
- d. Belum ada aplikasi pengganti Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang telah dinonaktifkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)

Dari Permasalahan diatas, dilakukan upaya penyelesaiannya dengan langkah sebagai berikut :

Pada poin a, Biro Administrasi Pembangunan melakukan upaya diantaranya:

1. Pada awal tahun Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Pelatihan aplikasi SMEP yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi untuk meng-entry aplikasi SMEP dan menentukan target –target realisasi setiap bulannya selama tahun berjalan
2. Berkoordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera meng-entry data realisasi keuangan, fisik dan permasalahan pelaksanaan APBD pada aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Pemprov. Jatim secara tepat waktu
3. Melaksanakan Rekonsiliasi Realisasi Keuangan dan fisik beserta permasalahan setiap awal bulan
4. Menyusun laporan ke Gubernur Jawa Timur terkait progress realisasi keuangan dan fisik beserta permasalahan Perangkat Daerah

Pada poin b, Biro Administrasi Pembangunan melakukan upaya yaitu dengan menerbitkan Surat Evaluasi Gubernur Jawa Timur terkait percepatan realisasi keuangan dan fisik kepada Perangkat Daerah yang realisasinya rendah

Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan pada poin c, Biro Administrasi Pembangunan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Berkoordinasi secara intensif dengan Pejabat Penghubung di Kabupaten / Kota agar segera melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke lapangan terkait realisasi APBD Kabupaten / Kota
3. Menyusun laporan ke Gubernur Jawa Timur terkait progress realisasi keuangan dan fisik Kabupaten / Kota Se- Jawa Timur.

Untuk mengatasi permasalahan pada poin d, Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2022 akan menginisiasi aplikasi terintegrasi pelaporan realiasi anggaran Kabupaten / Kota Se-Jawa Timur.

2. Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN.

Pada Sub Kegiatan ini terdapat hambatan adalah belum terupdate-nya tepat waktu penyampaian realisasi keuangan dan fisik beserta permasalahan pada

pelaksanaan realisasi APBN di Perangkat Daerah dan Kabupaten / Kota Se-Jawa Timur. Permasalahan tersebut penyelesaiannya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah yang mengelola APBN dan Kabupaten / Kota dalam percepatan realisasi APBN serta pelaporannya
- b) Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait percepatan realisasi dana APBN
- c) Melaksanakan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan Perangkat Daerah yang mengelola APBN dan Kabupaten / Kota terkait percepatan realisasi APBN
- d) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana APBN

3. Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

Permasalahan yang dihadapi pada sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melaporkan progress pembangunan di wilayahnya baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek lainnya kepada Gubernur secara berkala. Hal tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan pembangunan ke Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan aplikasi SINFRA untuk monitoring dan evaluasi pembangunan

4. Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Proses monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pembangunan daerah kerap kali terhambat akibat data yang dimiliki masing-masing instansi tidak menggunakan format yang seragam, data yang dimaksud yaitu: (1) Rumah Layak Huni; (2) Akses Sanitasi Layak; (3) Akses Sanitasi Aman; (4) Buang Air Besar Sembarangan (Babs); (5) Sanitasi

Penanganan Sampah Perkotaan; (6) Akses Air Minum Layak; (7) Akses Air Minum Jaringan Perpipaan; (8) Akses Air Minum Jaringan Bukan Perpipaan

- b. Dokumen pengajuan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk Penanggulangan Kerusakan Infrastruktur Provinsi Jawa Timur yang diusulkan oleh Perangkat Daerah tidak dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan Peraturan sehingga kerap kali menghambat proses

Dalam mengatasi permasalahan poin a, Biro Administrasi Pembangunan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan bentuk data capaian kinerja pembangunan yang ada pada sektor terkait dan diintegrasikan dalam satu bentuk format yang disepakati bersama.
2. Melakukan konsolidasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk keseragaman bentuk dan tolak ukur.

Selanjutnya upaya penyelesaian pada poin b adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi pengusul untuk melengkapi dokumen kelengkapan administrasi yang sesuai dengan Peraturan sebelum tanggal yang telah ditentukan agar proses pencairan Dana BTT masih dalam masa Status Tanggap Darurat

5. Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan memiliki permasalahan yang dihadapi adalah belum terintegrasinya pelaporan pembangunan daerah. Tahun 2022, Biro Administrasi pembangunan melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan melaksanakan koordinasi baik dengan instansi terkait dan Kabupaten / Kota serta monitoring dan evaluasi terkait penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

6. Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah, memiliki permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih banyaknya Perangkat Daerah yang belum memiliki pemahaman tentang Standar Belanja yang meliputi Standard Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB)

serta proses masing-masing penyusunan standar belanja dimaksud, dan persyaratan saat akan diinputkan ke SIPD.

- b. Belum adanya pemahaman Perangkat Daerah tentang batas waktu (timeline) penetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang SBU, HSPK dan ASB.

Dalam mengatasi permasalahan poin a, Biro Administrasi Pembangunan melakukan upaya dengan menyelenggarakan sosialisasi terhadap seluruh Perangkat Daerah terkait dengan definisi dan mekanisme proses penyusunan Peraturan Gubernur tentang SBU, HSPK dan ASB.

Sedangkan pada poin b, Biro Administrasi Pembangunan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan sosialisasi terhadap seluruh Perangkat Daerah terkait batas waktu (timeline) penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur tentang SBU, ASB, HSPK
2. Menginfokan batas waktu (time line) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang SBU, HSPK dan ASB kepada Perangkat Daerah terkait melalui Surat Edaran Gubernur
3. Melakukan desk dan pendampingan terkait mekanisme penyusunan ASB terhadap Perangkat Daerah yang mengusulkan ASB

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi Jawa Timur

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
									Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Sby	Persentaase Indikator Program yang tercapai	100	14.238.594.854	4.01.01	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah	Sby	Persentaase Indikator Program yang tercapai	100	10.031.890.000
			Persentase realisasi anggaran	97					Persentase realisasi anggaran	97	
			Indeks Profesional ASN	67					Indeks Profesional ASN	67	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keuangan	Sby	Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja	33	1.717.748.587	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keuangan	Sby	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	33	159.830.000
4.01.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sby	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13	42.645.748	4.01.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sby	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13	15.830.000

						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sby	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	8.607.937	4.01.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	2	6.045.600
4.01.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sby	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	8.607.937	4.01.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	2	4.490.400
4.01.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sby	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	8.607.937	4.01.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	2	4.370.600
4.01.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD	2	8.607.937	4.01.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD	2	4.593.400

						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sby	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8	1.632.797.945	4.01.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sby	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8	115.840.000
4.01.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sby	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	7.873.147	4.01.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sby	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	7.958.400
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sby	jumlah dokumen administrasi keuangan	12	8.656.058.065	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sby	jumlah dokumen administrasi keuangan	12	7.017.406.400
4.01.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sby	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33	8.233.513.965	4.01.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan tunjangan	Sby	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33	6.709.628.400
						4.01.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sby	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	254.256.000
4.01.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sby	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12	119.144.910	4.01.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sby	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12	25.693.800

						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sby	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	15.085.263	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sby	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	7.839.000
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sby	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	14.112.435	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sby	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	8.506.100
4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sby	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	1	15.550.723	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sby	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	1	6.554.700
4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sby	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	13	4.394.769	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sby	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	13	4.928.400
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	sby	jumlah laporan BMD	4	6.601.933	4.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	sby	jumlah laporan BMD	4	5.996.100
4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sby	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	6.601.933	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sby	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	5.996.100

						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 .01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	sby	jumlah laporan kepegawaian PD	12	464.650.900	4.01 .01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	sby	jumlah laporan kepegawaian PD	12	303.471.200
4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	sby	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	36.570.740	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	sby	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	46.873.000
4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sby	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	81.000.099	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sby	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	31.006.500
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	sby	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61	347.080.061	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	sby	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61	225.591.700
4.01 .01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	sby	jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	1	2.441.370.708	4.01 .01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	sby	jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	1	2.164.853.100
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sby	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	850.457.179	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sby	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	568.6911.350

						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	sby	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	564.900.258	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	sby	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	505.391.467
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	sby	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	277.522.008	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	sby	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	242.107.800
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sby	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	739.550.855	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sby	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	839.172.483
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	sby	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	8.940.408	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	sby	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	9.490.000
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sby	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	15	499.154.171	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sby	jumlah pengadaan barang milik daerah prasarana	0	0
4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	sby	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	15	499.154.171	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	sby	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	0	0

						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sby	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	55.877.552	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sby	jumlah jasa penunjang urusan	1	15.010.000
4.01.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sby	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	55.877.552	4.01.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sby	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	15.010.000
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sby	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	3	397.132.938	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sby	jumlah paket pemeliharaan BMD	3	397.132.938
4.01.01.1.09.004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	sby	Jumlah jasa	16	126.462.076	4.01.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendarandinas Operasional atau lapangan	sby	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	34	126.462.076
4.01.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	sby	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34	47.160.654	4.01.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	sby	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34	47.160.654

						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	sby	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	6	223.510.208	4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	sby	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	6	223.510.208
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Sby	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi pembangunan	16	16.683.116.146	40108	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Sby	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi pembangunan	16	6.265.511.000
4.0108.101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	11	11.254.839.969	40108101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	11	3.974.875.000
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jatim	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	4	2.333.791.946	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	4	724.119.920
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jatim	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	4	2.439.719.478	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	4	751.985.080

						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.08.1.01.003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jatim	Jumlah modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan	3	6.481.328.545	4.01.08.1.01.003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	3	2.498.770.000
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan	3	5.428.326.177	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan	3	2.290.636.000
4.01.08.1.02.001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah	3	1.446.349.760	4.01.08.1.02.001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jatim	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan	3	342.905.000
4.01.08.1.02.002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	3	1.709.346.568	4.01.08.1.02.002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	3	465.666.000
4.01.08.1.02.003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	3	2.272.629.849	4.01.08.1.02.003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jatim	Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan	3	1.482.065.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) berdasarkan asa demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Namun pada Tahun 2024, tidak ada usulan Program dan Kegiatan dari eksternal (masyarakat, LSM, asosiasi dan sebagainya).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Kerja yang akan dilakukan dalam periode 2024, perlu adanya tinjauan terhadap kebijakan nasional yang berlaku sehingga hasil rumusan dapat mendukung kebijakan nasional tersebut. Rencana kerja daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN) yang dijelaskan lebih detail pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam kurun waktu 5 tahunan melalui Peraturan Presiden. Secara umum, visi nasional pembangunan jangka panjang adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas didorong oleh kemajuan perekonomian serta persatuan dan kesatuan yang berlandaskan Pancasila.

Tujuan perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat
- 2) Membuka dan menyerbarluaskan kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan lapangan kerja
- 4) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik
- 5) Menumbuhkembangkan daya saing daerah

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, adalah :

Tema RKP Tahun 2024 adalah Pemulihan ekonomi dan Reformasi Struktural

Sedangkan agenda Pembangunan (Prioritas Nasional)

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Prioritas Nasional 2 : Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan
3. Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Prioritas Nasional 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Prioritas Nasional 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan arah kebijakan Nasional tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan yaitu membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaksanaan tugas simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, maka dukungan Biro Administrasi Pembangunan sangatlah penting dalam menyiapkan perumusan kebijakan dalam bidang Pembangunan serta mengendalikan pelaksanaan pembangunan .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Administrasi Pembangunan

Renja Biro Administrasi Pembangunan mengacu Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2024, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Maka tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan itu harus

diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Biro Administrasi Pembangunan 2019-2024 dan disesuaikan dengan tupoksi Biro Administrasi Pembangunan dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2019-2024, dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan

<p>Tujuan : Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan</p>
<p>Indikator Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan</p>
<p>Definisi Operasional / formulasi Formulasi :</p> $\frac{\text{Jumlah kebijakan dilaksanakan oleh objek kebijakan}}{\text{Jumlah kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$ <p>Definisi : Untuk kebijakan yang dimaksud diantaranya adalah Pergub, Kepgub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Pemprov. Jatim, sedangkan untuk obyek kebijakan adalah PD Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota yang terkait dengan kebijakan dimaksud</p>
<p>Sasaran : Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan</p>
<p>Indikator: 1. Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan Definisi Operasional / formulasi :</p> $\frac{\text{Jumlah kebijakan}}{\text{Jumlah rumusan kebijakan}} \times 100\%$ <p>Definisi : Untuk kebijakan yang dimaksud diantaranya Pergub, Kepgub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov. Jatim, Petunjuk Pelaksanaan Tugas</p>
<p>2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$ <p>Definisi : Untuk rekomendasi yang dimaksud adalah rekomendasi terkait penyerapan APBD dan APBN oleh PD Provinsi yang tidak sesuai dan ditindaklanjuti dengan Surat Teguran</p>
<p>3. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan Definisi : nilai didapat dari Biro Organisasi berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP disetiap tahunnya</p>

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berjumlah 2 Program dengan 10 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan Belanja Langsung senilai Rp. 16.297.401.000 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Indikator Program yang tercapai • Persentase realisasi Anggaran • Indeks Profesionalitas ASN 	Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 97 • 67 	10.031.890.000	APBD		<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 97 • 67 	10.031.890.000
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keuangan	jumlah dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja	Surabaya	33	159.830.000	APBD		33	159.830.000
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Surabaya	13	15.830.000	APBD		13	15.830.000
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Surabaya	2	6.045.600	APBD		2	6.045.600
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Surabaya	2	4.490.400	APBD		2	4.490.400
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Surabaya	2	4.370.600	APBD		2	4.370.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			1	2	3	4		5	6
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD	Surabaya	2	4.593.400	APBD		2	4.593.400
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Surabaya	8	115.840.000	APBD		8	115.840.000
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	surabaya	4	7.958.400	APBD		4	7.958.400
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan	Surabaya	12	7.017.406.400	APBD		12	7.017.406.400
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Surabaya	33	6.709.628.400	APBD		33	6.709.628.400
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Surabaya	12	254.256.000	APBD		12	254.256.000
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Surabaya	12	25.693.800	APBD		12	25.693.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Surabaya	12	7.839.000	APBD		12	7.839.000
4.01.01.1.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Surabaya	2	8.506.100	APBD		2	8.506.100
4.01.01.1.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	Surabaya	1	6.554.700	APBD		1	6.554.700
4.01.01.1.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Surabaya	1	4.928.400	APBD		1	4.928.400
4.01.01.1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan BMD	Surabaya	4	5.996.100	APBD		12	5.996.100
4.01.01.1.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	4	5.996.100	APBD		4	5.996.100
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah laporan kepegawaian PD	Surabaya	12	303.471.200	APBD		12	303.471.200
4.01.01.1.0 5.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi	Surabaya	12	46.873.000	APBD		12	46.873.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Surabaya	12	31.006.500	APBD		12	31.006.500
4.01.01.1.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Surabaya	61	225.591700	APBD		1	225.591700
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Surabaya	1	2.164.853.100	APBD		5	2.164.853.100
4.01.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Surabaya	1	568.6911.350	APBD		1	568.6911.350
4.01.01.1.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Surabaya	1	505.391.467	APBD		1	505.391.467
4.01.01.1.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Surabaya	1	242.107.800	APBD		1	242.107.800
4.01.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Surabaya	12	839.172.483	APBD		1	839.172.483
4.01.01.1.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Surabaya	1	9.490.000	APBD		1	9.490.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			1	2	3	4		5	6
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	Surabaya	-	0	APBD		0	0
4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Surabaya	-	0	APBD		0	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surabaya	1	15.010.000	APBD		1	15.010.000
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Surabaya	1	15.010.000	APBD		1	15.010.000
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Surabaya	3	366.024.800	APBD		3	397.132.938
4.01.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendarandinas Operasional atau lapangan	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Surabaya	34	76.384.800	APBD		16	126.462.076
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Surabaya	59	49.640.000	APBD		12	47.160.654
4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Jatim	2	240.000.000	APBD		6	223.510.208
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan	Jatim	16	6.265.511.000	APBD		16	6.265.511.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			1	2	3	4		5	6
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	2.290	11	3.974.875.000	APBD		11	3.974.875.000
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Jatim	4	724.119.920	APBD		4	724.119.920
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Jatim	4	751.985.080	APBD		4	751.985.080
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah pembangunan wilayah 1, 2, 3	Jatim	3	2.498.770.000	APBD		4	2.498.770.000
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jatim	3	2.290.636.000	APBD		3	2.290.636.000
4.01.08.1.02.0001	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan	Jatim	3	342.905.000	APBD		3	342.905.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			1	2	3	4		5	6
4.01.08.1.0 2.0002	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Jatim	3	465.666.000	APBD		3	465.666.000
4.01.08.1.0 2.0003	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Jatim	3	1.482.065.000	APBD		3	1.482.065.000
TOTAL									16.297.401.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional Tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan yaitu menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pembinaan umum di bidang administrasi pembangunan, menyiapkan dan melaksanakan kerjasama pemerintah provinsi dengan badan usaha. Dengan demikian, Biro Administrasi Pembangunan menunjang Misi ke – 3 pada RPJMD 2019 – 2024 yaitu : Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris, memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi

Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 termasuk Perangkat Daerah Penunjang dengan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pada bidang kerjanya. Untuk itu biro Administrasi Pembangunan tidak memiliki Program Kegiatan Prioritas yang Mendukung Prioritas Provinsi melainkan hanya memiliki Program Penunjang Pendukung Tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Tabel Prioritas Perangkat Daerah 2024

Prioritas PD	Nawa Bhakti	Kode Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengendalian Administrasi Pembangunan	-	40108	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	724.119.920	
					Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	751.985.080	
					Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2.498.770.000	
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	342.905.000	
					Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	465.666.000	
					Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1.482.065.000	

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

- a) penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian

- administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 - c) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
 - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcome) / Kegiatan (output) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Tahun 2024, terdapat 2 Program dengan 10 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan total belanja operasional dan belanja modal sebesar Rp. 16.683.166.146 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam)

Tahun 2025, terdapat 2 Program dengan 10 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan total belanja operasional dan belanja modal sebesar Rp. 16.683.166.146 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam)

BAB V

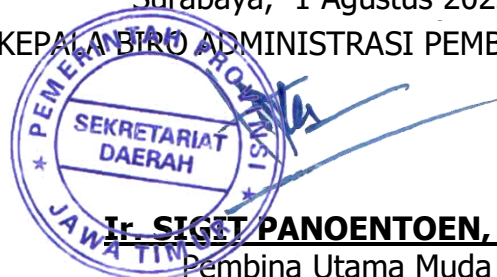
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 (Renja) ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2024 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setda Jawa Timur Tahun 2019-2024. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Biro Administrasi Pembangunan pada Tahun 2024, Renja Biro Administrasi Pembangunan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumber daya manusia yang ada.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Biro Administrasi Pembangunan merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Surabaya, 1 Agustus 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



Ir. SIGIT PANOENTOEN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199703 1 001